

**PERAN DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KELURAHAN DONGKOP**

Muhammad Hisyam¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Nazaki³
m.mhasyim6132@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Indonesia as an archipelago country is certainly required to be able to develop and make good use of its maritime sector, ranging from the transportation, defense, and utilization of its natural resources. In this study, researchers will focus on problems related to marine aquaculture fisheries conducted by fishing communities. Aquaculture activities carried out by the fishing community are generally located in the coastal sea of Tanjungpinang City which we commonly call keramba. In Dongkop Village itself there are several aquaculture activities carried out by the fishing community either in groups or individually or privately owned. The purpose of this research is to find out how the role of the Department of Food Agriculture and Fisheries of Tanjungpinang City in empowering the fishing community in Dongkop Village. The method used in this research is qualitative descriptive method. The results of this research are in the empowerment of fishing communities in Dongkop Village, The Department of Food Agriculture and Fisheries of Tanjungpinang City taking four roles, namely: The Role of Facilitators, The Role of Education, The Role of Representatives, and Technical Roles. The obstacles experienced by the Department of Food Agriculture and Fisheries of Tanjungpinang City in empowering the fishing community in Dongkop Village lies in the mindset of people who still believe that aquaculture is a difficult thing to do and requires a large capital. For this reason, the government strives to provide community facilities such as donating grouper fish seedlings and food equipment for keramba. In addition, the government also provides education to the community through training activities, the government is also present in providing socialization to the community related to the importance of aquaculture, and finally the government determines the technical and rules that must be adhered to in fishery cultivation. The researchers suggested that the government should be more intensive in socializing about aquaculture to the fishing community in Dongkop Village.

Keywords: Role, Empowerment, Fishing Community.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya dituntut untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan dengan baik sektor maritimnya, mulai dari sektor transportasi, pertahanan, dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Kita mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari sebagian besar wilayah laut dan tentunya kekayaan alam dan sumber daya laut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. Untuk itu, perlu peran serta pemerintah dalam memberdayakan masyarakat guna memanfaatkan sumber daya laut yang begitu luas di Indonesia.

Di Kota Tanjungpinang, perangkat daerah yang bertanggungjawab untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi laut yaitu dinas pertanian pangan dan perikanan (DPPP). Dinas pertanian pangan dan perikanan bertugas untuk membantu kepala daerah dalam memanfaatkan dan mengembangkan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan di wilayah Kota Tanjungpinang.

Namun, kegiatan budidaya tersebut masih terbilang kurang banyak diminati oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok. Banyak masyarakat nelayan yang lebih memilih menjadi nelayan tangkap daripada nelayan budidaya. Disisi lain, peran dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang selama ini masih belum begitu efektif dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok baik bagi masyarakat yang telah memiliki budidaya perikanan laut maupun masyarakat yang belum memiliki usaha budidaya perikanan laut.

Permasalahan utama yang terlihat di lapangan ialah kurangnya nelayan pembudidaya didaerah tersebut sedangkan budidaya perikanan laut merupakan kegiatan usaha yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan di wilayah Kelurahan Dompok yang berada di pesisir pantai. Selain itu, jika kita melihat dari latar belakang profesi masyarakat Kelurahan Dompok pada umumnya ialah bekerja sebaga nelayan, seharusnya dapat diberdayakan dengan maksimal.

Tabel 1. Perikanan Budidaya di Kelurahan Dompok

No	Lokasi Pembudidaya	Jumlah
1	Dompok Tanjung Siambang	12 Budidaya
2	Dompok Lama	3 Budidaya
3	Dompok Seberang	1 Budidaya
4	Dompok Kelam Pagi	1 Budidaya
Total		17 Budidaya

Menanggapi informasi tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam mengembangkan dan memanfaatkan sektor perikanan budidaya di Kelurahan Dompok. Hal ini dikarenakan perangkat pemerintah yang bertugas untuk membantu walikota dalam memanfaatkan dan mengembangkan perikanan budidaya ialah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang. Fungsi dari perangkat pemerintah ini ialah memberdayakan masyarakat, menyampaikan informasi, dan mengatur kegiatan pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan. Selain itu, fungsi sosialisasi juga menjadi tanggungjawab dari DPPP sebagai wujud andil pemerintah.

Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan dan informasi yang dapat dikumpulkan maka peneliti tertarik untuk mengusulkan penelitian yang dapat menjadi judul yaitu “PERAN DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN DOMPAK”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok, dan apa saja kendala atau hambatan yang dialami pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pertanian Pangan dan

Perikanan Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok, dan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dialami pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2013) yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan yaitu mengikuti konsep model Miles dan Huberman dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2012:246-252) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Berikut ini beberapa informan yang peneliti wawancarai diantaranya adalah:

Tabel 2. Informan

No	Bagian Peran / Posisi Informan	Jumlah
1	Kasi. Perikanan Budidaya DPPP Kota Tanjungpinang	1 Orang
2	Kabid. Perikanan DPPP Kota Tanjungpinang	1 Orang
3	Lurah / Sekretaris Kelurahan Dompok	1 Orang
4	Perwakilan Pembudidaya di Dompok Tanjung Siambang	1 Orang
5	Perwakilan Pembudidaya di Dompok Lama	1 Orang
6	Bpk. Ati (Pembudidaya di Dompok Seberang)	1 Orang
7	Bpk. Sulaiman (Pembudidaya di Dompok Kelam Pagi)	1 Orang
8	Masyarakat Nelayan Bukan Pembudidaya	3 Orang
TOTAL		10 Orang

III. Hasil dan Pembahasan

Provinsi Kepulauan Riau Memiliki luas wilayah 251.810,71 Km², terdiri dari lautan 241.2153 Km² (96%) dan daratan 10.595,41 Km² (4%), dan panjang garis pantai 2367.6 Km². Dengan kondisi demikian, Provinsi Kepulauan Riau tentunya menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Oleh Karena itu diperlukan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan kepada kota di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pangan, dan perikanan.

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2106 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota pada Urusan Pangan, Urusan Pertanian Dan Urusan Perikanan.

Dompok adalah salah satu kelurahan di kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Kelurahan Dompok meliputi seluruh Pulau Dompok dan wilayah Dompok Daratan. Pulau Dompok merupakan pusat pemerintahan provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Dompok memiliki luas wilayah 3.747 Ha, sekaligus menjadi kelurahan terbesar di kota Tanjungpinang.

Kelurahan Dompok mempunyai topografi dataran tinggi dengan ketinggian ± 64 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 110 hari sebanyak 2.500 – 3.500 mm/tahun dengan suhu berkisar 26°C - 34°C .

Jumlah penduduk kelurahan Dompok sampai Desember 2019 berjumlah 4.191 jiwa. Deskripsi tentang kependudukan di kelurahan Dompok kecamatan Bukit Bestari dapat dibagi menjadi komposisi menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 2.170 jiwa, dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 2021 jiwa.

Masyarakat nelayan adalah suatu kesatuan sosial yang hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai (Kusnadi, 2011b). Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Di Kota Tanjungpinang, pemanfaatan sumber daya laut khususnya fauna perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap biasa dilakukan oleh nelayan di laut lepas pantai, sementara untuk perikanan budidaya dapat dilakukan masyarakat nelayan di pesisir pantai dan juga di daratan (budidaya air tawar).

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di lapangan, adapun beberapa hal yang dilakukan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu dengan melakukan:

a. Peran Fasilitator

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok melaksanakan peran fasilitator yaitu dengan cara pemerintah berperan sebagai agen yang memfasilitasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan dengan memberikan bantuan-bantuan (Pawalin, 2017).

Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan ataupun memfasilitasi masyarakat nelayan seperti memberikan permodalan dalam bentuk bantuan uang modal ataupun modal dalam bentuk barang kepada masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok. Dengan memberikan pembinaan serta permodalan kepada masyarakat nelayan, maka Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang telah melakukan peran fasilitator.

Menurut Teori Peran Jim Ife (2008) dalam Pawalin (2017) bentuk peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu peran fasilitator. Pemerintah sebagai fasilitator maksudnya ialah pemerintah berperan sebagai agen yang memfasilitasi masyarakat dalam upaya pemberdayaannya dengan memberikan bantuan-bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dalam mendukung permodalan untuk memberdayakan masyarakat nelayan adalah dengan cara memberikan bantuan ke kelompok-kelompok koperasi.

Kendala atau hambatan yang dialami pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok melalui peran fasilitator yaitu terletak pada persepsi, pola pikir, ataupun pandangan masyarakat terhadap kegiatan pembudidayaan.

Masyarakat masih memiliki persepsi bahwa kegiatan pembudidayaan perikanan merupakan kegiatan yang sulit untuk dilakukan, sehingga meskipun pemerintah hadir dengan memberikan bantuan berupa permodalan, bibit ikan kerapu, dan peralatan hal tersebut tidak dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya. Apabila pemerintah memberikan bantuan berupa modal untuk melakukan kegiatan budidaya perikanan, masyarakat

mempergunakannya untuk hal lain seperti untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha lainnya yaitu membuka kedai kelontong.

b. Peran Edukator

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang juga melakukan peran edukator yaitu pemerintah berperan sebagai agen yang mendidik masyarakat dalam upaya pemberdayaannya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan (Pawalin, 2017).

Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan (*skill*) masyarakat nelayan, baik itu kemampuan melakukan sesuatu (*hard skill*) ataupun kemampuan merencanakan sesuatu (*soft skill*). Dengan melaksanakan pelatihan masyarakat nelayan, maka Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang telah melakukan peran edukator yaitu peran sebagai pendidik dan pelatih sekaligus pengembang masyarakat nelayan.

Menurut Teori Peran Jim Iff (2008) dalam Pawalin (2017) bentuk peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu peran edukator. Pemerintah sebagai edukator maksudnya ialah pemerintah berperan sebagai agen yang mendidik masyarakat dalam upaya pemberdayaannya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan (Pawalin, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program kerja yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok sudah ada dan tercantum dalam anggaran program kegiatan sejak tahun 2019.

Hasil analisis tersebut diperkuat juga oleh hasil observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dan data-data dokumentasi. Pada saat dilakukan penelitian, peneliti melihat foto-foto dokumentasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang pada saat dilakukannya pelatihan tentang pembudidayaan ikan bagi masyarakat dompak. Selain itu, terdapat pula arsip-arsip yang berisi daftar masyarakat yang hadir sebagai peserta pelatihan dan pematerinya.

Kendala atau hambatan yang dialami oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok melalui peran edukator yaitu terletak pada pandangan masyarakat terhadap kegiatan pembudidayaan.

Pemikiran masyarakat yang belum terbuka untuk kegiatan budidaya perikanan membuat pemerintah harus bekerja lebih giat lagi merubah pola pikir masyarakat dengan cara mengadakan seminar, sosialisasi, ataupun pelatihan-pelatihan. Tujuan dari sosialisasi tersebut agar pemikiran masyarakat menjadi terbuka untuk dapat diberdayakan dan menjalankan kegiatan budidaya perikanan di Kelurahan Dompok.

c. Peran Representator

Kemudian Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok juga dilakukan dengan cara menerapkan peran representator yaitu hadir dalam setiap kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pemberdayaan (Pawalin, 2017).

Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi tentang peraturan perikanan tangkap dan peraturan perikanan budidaya, atau sosialisasi tentang cara melakukan pembudidayaan perikanan. Dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat nelayan, maka Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang telah

melakukan peran representator yaitu hadir dalam setiap kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pemberdayaan (Pawalin, 2017).

Menurut Teori Peran Jim Ife (2008) dalam Pawalin (2017) bentuk peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu peran representator. Pemerintah sebagai representator maksudnya ialah hadir dalam setiap kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pemberdayaan (Pawalin, 2017). Bentuk kehadiran pemerintah ini dapat berupa penyampaian, kunjungan, maupun sosialisasi kepada masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok.

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam upaya memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok masih terbilang kurang berperan sebagai representator atau peran hadir ditengah-tengah masyarakat. Sikap Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang yang hadir (*represent*) dengan cara mensosialisasikan tentang program budidaya dan pentingnya budidaya perikanan setelah beberapa bulan masyarakat melakukan pembudidayaan dinilai kurang begitu efektif. Selain itu, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang juga langsung turun ke lapangan untuk mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat nelayan dan juga mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat nelayan yang telah melakukan kegiatan pembudidayaan. Kemudian, dari hasil wawancara juga diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini melakukan sosialisasi sesuai dengan perubahan peraturan terbaru.

Kendala atau hambatan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok yaitu terletak pada persepsi masyarakat terhadap kegiatan pembudidayaan.

Masyarakat dampak menganggap bahwa kegiatan pembudidayaan merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan dan membutuhkan modal yang besar. Prinsip "*kais pagi makan pagi, kais petang makan petang*" yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok membuat masyarakat nelayan enggan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan. Masyarakat lebih memutuskan untuk melaut dan menjadi seorang nelayan dengan tangkapan ikan yang sedikit tetapi dapat dijual pada hari itu juga daripada menjadi pembudidaya ikan yang harus merawat dan mengelola keramba atau tempat pembudidayaan ikan hingga akhirnya panen.

d. Peran Teknis

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang juga melakukan peran teknis yaitu pemerintah berperan sebagai agen yang menentukan teknis atau aturan-aturan dalam upaya pemberdayaan masyarakat menurut Teori Peran Jim Ife (2008) dalam (Pawalin, 2017).

Selain itu, pemerintah pernah memberikan petunjuk teknis bagaimana cara memperoleh bantuan permodalan dalam usaha pembudidayaan perikanan dan bagaimana cara melakukan pembudidayaan perikanan. Namun, hal tersebut tampaknya tidak cukup bagi masyarakat nelayan. Hal ini dikarenakan masyarakat masih berfikir bahwa kegiatan pembudidayaan sangat sulit meskipun aturan-aturannya telah dijelaskan.

Kendala atau hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam melaksanakan peran teknis atau sebagai agen yang menentukan teknis dan aturan-aturan dalam upaya pemberdayaan

masyarakat yaitu terletak pada pola pikir ataupun pandangan masyarakat terhadap kegiatan pembudidayaan.

Masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok masih berfikir sederhana bahwa kegiatan budidaya perikanan merupakan kegiatan yang sulit untuk dilakukan dan membutuhkan modal yang besar daripada pergi ke laut untuk menangkap ikan. Hal itulah yang menyebabkan banyak masyarakat nelayan yang lebih memilih bidang perikanan tangkap daripada perikanan budidaya. Selain itu, sudut pandang masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan budidaya membutuhkan peralatan yang banyak dan permodalan yang besar juga menghambat pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan penelitian yang dapat disusun tentang peran Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu:

1. Peran fasilitator dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan ataupun memfasilitasi masyarakat nelayan seperti memberikan permodalan dalam bentuk bantuan uang modal ataupun modal dalam bentuk barang kepada masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok. Dengan memberikan pembinaan serta permodalan kepada masyarakat nelayan, maka Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang telah melakukan peran fasilitator.
2. Peran edukator dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan (*skill*) masyarakat nelayan, baik itu kemampuan melakukan sesuatu (*hard skill*) ataupun kemampuan merencanakan sesuatu (*soft skill*). Dengan melaksanakan pelatihan masyarakat nelayan, maka Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang telah melakukan peran edukator yaitu peran sebagai pendidik dan pelatih sekaligus pengembang masyarakat nelayan.
3. Peran representator dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan yaitu berperan sebagai pemberi informasi dengan cara mengadakan sosialisasi.
4. Dalam hal peran teknis yang pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang menentukan bagaimana teknis dalam melakukan kegiatan pembudidayaan perikanan.
5. Kendala atau hambatan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan yang dialami oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang yaitu persepsi atau prinsip masyarakat yang telah lama dianut oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok. Masyarakat tidak terlalu termotivasi untuk melakukan kegiatan budidaya dikarenakan mereka menginginkan sesuatu yang instan sedangkan mereka menganggap kegiatan budidaya merupakan suatu usaha yang sulit untuk dikerjakan dan juga membutuhkan modal yang besar untuk memulainya. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang saat ini dilakukan oleh DPPP adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan.

V. Daftar Pustaka

- Alwi, H., & Tang, U. M. (2013). *Dasar-dasar Budidaya Perikanan*. C.V Andi Offset.
- Burhanuddin, A. I., & Nessa, M. N. (2018). *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan* (Universita).
- Durianto, R., Suryono, A., & Hermawan. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Ferdiansyah, F. D. (2015). *Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Probolinggo*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Isra, S. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. RajaGrafindo Persada.
- Istiqomah, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Peternak Kambing Kaligesing Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo). *Journal of Politic and Government*, 1(2).
- Jim, I., & Frank, T. (2008). *Community Development*. Pustaka.
- Kapile, C., & Nuraedah. (2017). *Studi Masyarakat Indonesia*. DEEPUBLISH.
- Kaswandi. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kusnadi. (2011a). *Jaminan Sosial Nelayan*. LKiS.
- Kusnadi. (2011b). *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. LKiS.
- Labolo, M. (2012). *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, M. (2018). *Perikanan Budidaya Laut Teluk Saleh : Pendekatan Multidimensi Menuju Pengelolaan Holistik*. Agung Media.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (I. Taufik (ed.); XXVII (Rev). PT. Remaja Rosdakarya.
- Murti, H., & Srimulyani, V. A. (2013). Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Variabel Pemediasi Kepuasan Kerja Pada Pdam Kota Madiun. *JRMA Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 10–17.
- Nawastuti, D. (2019). *Assessment Perikanan Tangkap*. BPFE.
- Pawalin, O. (2017). *Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*. Universitas Lampung.
- Rangkuti, A. M. (2017). *Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia*. PT Bumi Aksara.
- Rustanto, B. (2015). *Masyarakat Multikultur di Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setiyono, B., & Admin, M. P. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik : Perinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*. CAPS.
- Siombo, M. R. (2013). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. PustakaBaruPress.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Tanjung, A. H. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD*. Alfabeta.
- UU Pemerintah Daerah, 23 (2014).
- Undang Undang Dasar 1945.
- Widodo, J., & Suadi. (2016). *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. UGM Perss.
- Yuanda, B. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dalam Peningkatan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Ekonomi Islam Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 1(1).

VI. Ucapan Terimakasih

Dalam proses penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA sebagai Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang,
2. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang,
3. Asist. Prof. Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S. IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing penulis dalam melakukan penelitian ini,
4. Asist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.